

PENERAPAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Sergiana Delaista¹, Endang Indartuti²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

sergianadelarista@gmail.com, endangindartuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital adalah E-KTP yang berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Pelaksanaan program pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memfasilitasi dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Pelaksanaan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat dan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi digital. Kegiatan ini melibatkan serangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan penggunaan aplikasi IKD dan melakukan pendampingan bagi warga dalam mengakses dan memanfaatkan fitur aplikasi tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman masyarakat tentang penggunaan alat teknologi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat secara langsung pada lapangan secara observasi lapangan, sementara data sekunder didapat dari referensi lain. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Sukolilo sangat antusias dan mampu menggunakan aplikasi IKD, meskipun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti, keterbatasan internet dan kemampuan penggunaan alat teknologi digital (handphone). Dengan demikian, penerapan aplikasi IKD dapat menjadi Solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Adanya Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital diharapkan tersebar secara merata diseluruh Indonesia.

Kata kunci: Penerapan, aplikasi IKD, kependudukan

ABSTRACT

Digital Population Identity is an E-KTP in digital form that contains electronic information used to present population documents and feedback data in digital applications via smartphones that display personal data as the identity of the person concerned. The implementation of this community service program aims to introduce and facilitate the Implementation of the Digital Population Identity Application (IKD) at the Sukolilo District Office, Surabaya City. The implementation of this community service is motivated by the needs of the community and faster, more efficient, and digital technology-based population administration services. This activity involves a series of socialization activities, training in the use of the IKD application and providing assistance to residents in accessing and utilizing the application's features. The method used in this activity is a qualitative method. This method is used to describe the community's experience of using technological tools. The data sources used in this study are primary data sources obtained directly in the field through field observations, while secondary data are obtained from other references. The results of this community service activity show that the Sukolilo District Community is very enthusiastic and able to use the IKD application, although there are still several challenges faced, such as limited internet and the ability to use digital technology tools (cellphones). Thus, the implementation of the IKD application can be an innovative solution to improve the quality of population administration services. The Implementation of the Digital Population Identity Application is expected to be evenly distributed throughout Indonesia.

Keywords: Implementation, IKD application, population

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan pemanfaatan informasi. Perkembangan digital yang pesat ini tentu memiliki pengaruh dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan menguasai teknologi sudah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah yang mendorong untuk melakukan suatu reformasi pada seluruh bagian tata kelola pemerintah. Dalam era yang serba digital perlu adanya keamanan khususnya keamanan data diri seperti nama, alamat, nomor telepon, foto dan juga data keluarga yang seringkali di bobol oleh orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam hal kejahatan atau penipuan. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet serta timbulnya perundungan ataupun pelecehan berbasis internet. Penyebaran data pribadi muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun paling banyak korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis (Alvirnia Nurmani Andraputri & Ruhaeni, 2023). Dalam Undang-Undang pelayanan publik dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga memberi proteksi bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik (Mirna et al., 2023). Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu pentingnya diri kita untuk menjaga data pribadi seperti KTP dari kejahatan, serangan sosial, penyalahgunaan identitas dan kriminalitas, serta waspada dengan isu cyber yang marak sekali di dunia maya, meskipun sudah disahkan secara UUD Perlindungan Data kita tetap menjaga kerahasiaan data pribadi maupun keluarga.

Salah satu inovasi yang diterapkan pemerintah adalah pengembangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan representasi digital dari dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk-elektronik (e-KTP) yang dapat diakses melalui perangkat pintar (smartphone). Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi data diri yang bisa diakses melalui smartphone dan terhubung ke internet untuk menampilkan data penduduk. Menurut (Salsa Bella & Widodo, 2023) Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan serta data dalam aplikasi digital melalui smartphone. Implementasi Digital jika berhasil dilaksanakan maka sangat membantu semua pihak, pemerintah dapat menghemat anggaran karena mengurangi pengadaan blangko KTP elektronik, masyarakat dimudahkan karena tidak perlu fisik KTP elektronik dalam proses pelayanan (Permadi & Rokhman, 2023). Implementasi IKD diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mengurangi potensi pemalsuan dokumen. Kota Surabaya sebagai salah satu pionir dalam penerapan IKD. Kecamatan Sukolilo sebagai bagian dari Kota Surabaya tentu tidak luput dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan IKD.

Hakikatnya dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) diselenggarakan secara terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan kerangka kerja data yang menggunakan inovasi data dan korespondensi untuk menangani administrasi data organisasi kependudukan ditingkat organisasi yang dipilih dan pelaksana sebagai satu kesatuan. Hal ini secara tegas disebutkan pada pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 bahwa "Penyelenggara Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat." Identitas digital dalam lingkup SIAK diharapkan tetap dapat memberikan kepuasan atas kebebasan otoritatif masyarakat secara terbuka dan memberikan keamanan yang berhubungan dengan laporan masyarakat tanpa perlakuan yang biasa. Hal ini dapat terlaksana dengan tidak lepas dari peran serta pemerintah dan pemerintah daerah, juga dukungan peran aktif masyarakat. SIAK adalah sebuah kerangka

data yang menggunakan inovasi dan korespondensi untuk menangani administrasi data organisasi kependudukan di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan (Soemartono dan Hendrastuti, 2011:160). Tujuan utama SIAK adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan untuk melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, dan akta-akta Catatan Sipil berbasis NIK) (Gatiningsih, Santoso, dan Irena, 2019:79).

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan Pelaksanaan Program Magang, metode pelaksanaan yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman masyarakat tentang penggunaan alat teknologi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat secara langsung pada lapangan secara observasi lapangan, sementara data sekunder didapat dari referensi lain.

Periode Pelaksanaan Program Magang ini di laksanakan di Kantor Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya secara langsung selama 40 hari dimulai dari tanggal 29 juli 2024 sampai 12 september 2024, dimulai dari Senin sampai sabtu dari pukul 07.30 sampai 16.00, di hari selasa sampai pukul 18.00, dihari jumat sampai pukul 17.00 dan di hari sabtu dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00. Pelaksanaan kegiatan ini dengan melihat secara langsung dan mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah melakukan aktivasi aplikasi IKD serta masyarakat yang belum dan sudah mengetahui apa itu aplikasi IKD sekaligus melihat bagaimana cara mengimplementasikan Aplikasi IKD kepada masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan Sukolilo saat sedang melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Dengan begitu peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke masyarakat kecamatan sukolilo. tujuan penerapan Aplikasi IKD ini untuk menjadi salah satu syarat permohonan Administrasi Kependudukan serta untuk mempermudah masyarakat dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan sebuah inovasi yang telah di implementasikan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi layanan publik. Adanya Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan tersebar secara merata diseluruh Indonesia. Disebutkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 bahwa tujuan dari penyelenggaraan identitas kependudukan digital antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengikuti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi populasi
- 2) Meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan untuk masyarakat
- 3) Bekerja dengan mudah dan mempercepat pertukaan pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital
- 4) Mengamankan bentuk kepemilikan identitas digital melalui kerangka kerja verifikasi untuk mencegah kesalahan representasi dan kebocoran informasi.

Adapun manfaat dari aplikasi IKD ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempermudah transaksi layanan publik dengan aplikasi IKD.
- 2) Mencegah penyalahgunaan dimana data dalam aplikasi IKD dilengkapi dengan sistem autentikasi dan keamanan yang canggih dengan menggunakan PIN sebagai kode akses ke aplikasi IKD dan terhindar dari akses yang tidak sah.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya aplikasi IKD agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya saat mengakses layanan publik.
- 4) Merancang sistem untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi.

5) Keamanan data pribadi terjamin akan dilindungi melalui berbagai lapisan keamanan termasuk PIN dan pengenalan wajah.

Berikut proses pendaftaran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):

- 1) Telah memiliki KTP-el atau sudah melakukan perekaman KTP-el
- 2) Download aplikasi IKD melalui aplikasi Playstore/Appstore
- 3) Melakukan pendaftaran dengan mengisi data seperti NIK, E-mail dan No HP
- 4) Melakukan swafoto diri tanpa menggunakan masker, kacamata dan topi sesuai dengan KTP-el
- 5) Setelah verifikasi, scan QR Code di aplikasi SIAK petugas Dispenduk Capil, Kecamatan maupun Kelurahan
- 6) Mengecek E-mail dan melakukan aktivasi dengan memasukan kode yang sudah dikirim SIAK melalui E-mail dan aplikasi IKD anda sudah aktif.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi IKD yang telah Aktif

Sumber: (Tribun Health.com, 2024)

Implementasi kebijakan dalam teori George C. Edwar III berpandangan bahwa sebuah kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif itu karena dipengaruhi oleh empat variabel atau isu pokok yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau perilaku dan Struktur Birokasi. Dari keempat variabel tersebut dapat digunakan untuk melakukan Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menunjang pelayanan publik di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

□ Komunikasi: berperan penting untuk memperkenalkan konsep dan tujuan IKD kepada masyarakat agar masyarakat memahami manfaat dan cara menggunakan aplikasi IKD. Komunikasi juga membantu masyarakat untuk mengetahui perubahan dan peningkatan dalam proses administrasi kependudukan serta memudahkan masyarakat dalam mengadaptasi teknologi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aplikasi IKD.

□ Sumber Daya: digunakan untuk mengumpulkan data kependudukan yang diperlukan dalam aplikasi IKD, seperti biodata, alamat, status perkawinan dan lain-lain. Sumber daya digunakan dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan yang meliputi verifikasi, validasi, dan memastikan keakuratan dan keamanan data. Sumber daya juga digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data kependudukan yang meliputi autentikasi, otorisasi dan pengawasan keamanan data.

□ Disposisi: masyarakat harus memahami cara menggunakan aplikasi IKD, cara mengunduh aplikasi IKD, mendaftar akun dan cara mengaktifkan akun. Disposisi diperlukan untuk mengakses aplikasi

dan dan memahami fungsi-fungsi yang tersedia, memahami cara menggunakan fitur keamanan yang tersedia dalam aplikasi IKD, PIN, code biometrik dan memahami penggunaan fitur keamanan untuk melindungi data kependudukan.

□ Struktur Biokrasi: membantu dalam Pengembangan Standar Operasional (SOP) yang jelas dan berstruktur. Strukrut birokrsi tersebut memastikan implementasi IKN berjalan dengan teratur dan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan, membantu dalam pengembangan komunikasi yang efektif antara pemerintah, pegawai dan masyarakat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya mencatat 10 kecamatan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi periode 2023/2024. Berdasarkan data dari PDAK DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI RI, Kecamatan Sukolilo menempati posisi ke-9 dengan IKD aktif mencapai 11.192.

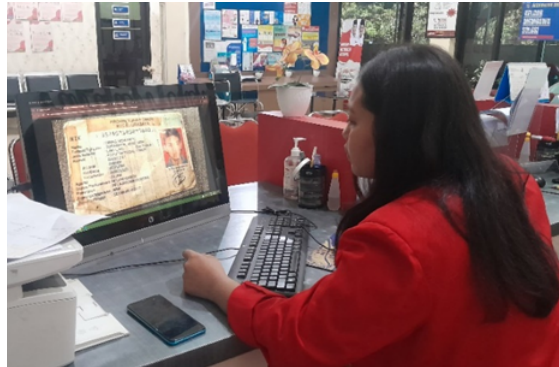


Daftar kecamatan dengan aktivasi IKD tertinggi di Kota Surabaya

Sumber: (<http://swargalokasurabaya.id/>)



Gambar 1. Aktivasi Aplikasi IKD di ruangan Pelayanan Umum sekaligus memberi penjelasan terkait penggunaan Aplikasi IKD



Gambar 2: Mencetak ulang e-KTP rusak

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan sebuah inovasi penting dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, tetapi juga meningkatkan efisiensi birokrasi dan keamanan data pribadi. IKD terintegasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) yang memungkinkan pengelolaan data kependudukan secara terpusat dan aman. Implementasi ini sejalan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang bertujuan untuk memajukan teknologi informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Namun, pencapaian Kecamatan Sukolilo yang berada di peringkat ke-9 dalam aktivasi IKD menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat.

Langkah-langkah dalam mengimplementasikan aplikasi IKD berikut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya dalam mendukung digitalisasi layanan publik di kecamatan Sukolilo:

- Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi terkait manfaat dan cara penggunaan IKD baik melalui media online maupun langsung agar masyarakat lebih memahami pentingnya aplikasi IKD ini.
- Penguatan Infrastruktur: Memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai terutama jaringan internet yang stabil untuk mendukung penggunaan aplikasi IKD secara luas.
- Pelatihan Masyarakat: Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis secara rutin ditingkat kecamatan dan kelurahan untuk membantu masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan Aplikasi IKD di tingkat masyarakat untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari Solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Alvirnia Nurimani Andraputri, C. & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press

Gatiningsih, Budi Santoso, Eko., dan Irena, Devi. 2012. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Mirna, M., Judhariksawan, & Maskum. (2023). "Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15(1): 16–30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>

Permadi, I. B., & Rokhman, A. 2023. "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2):80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>

Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1):14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>

Soemartono, Triyuni dan S. Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri.